



Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Sentral Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Nurmi Surahma Dilla¹, Sapri², Hardianti Laduppa³, Abdul Jabbar⁴

^{1,2,3}Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidrap, Indonesia

⁴Ilmu Pemerintahan, FISIPs, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidrap, Indonesia

Email: ¹nurmisurahmadilla@gmail.com, ²sapritajuddin3@gmail.com, ³hardianti@umsrappang.ac.id,

⁴jbr.nyonk1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan sampah pemerintah di Pasar Sentral Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Permasalahan pengelolaan sampah di pasar ini rumit dan ditandai dengan tumpukan sampah, fasilitas penyimpanan yang tidak memadai, serta kurangnya petugas dan peralatan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan mengumpulkan data dari enam informan utama anggota masyarakat, pengelola pasar, petugas kebersihan, organisasi pemerintah, dan pengunjung pasar melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo melalui proses coding, thematic analysis, dan visualisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan sampah belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari lemahnya aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Minimnya fasilitas pendukung, terbatasnya jumlah armada, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Penerapan manajemen publik dengan pendekatan George R. Terry diidentifikasi sebagai solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, melalui penyusunan rencana terintegrasi, edukasi kepada masyarakat, dan penguatan sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, serta warga. Penelitian ini menekankan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sarana prasarana, serta program edukasi berkelanjutan sebagai langkah menuju pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Manajemen Publik.

Abstract

This study aims to examine the government's waste management practices at Pasar Sentral Rappang, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency, and to formulate strategic steps that can enhance the effectiveness of waste management in the area. The waste management issues in this market are complex, marked by waste accumulation, inadequate storage facilities, and a shortage of personnel and equipment. This research employs a qualitative methodology, collecting data from six key informants—community members, market managers, cleaning staff, government organizations, and market visitors—through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using NVivo software through processes of coding, thematic analysis, and data visualization. The results show that the government's role in waste management has not been fully optimized. This is evident from weaknesses in planning, organizing, mobilizing, and controlling. The lack of supporting infrastructure, limited number of transport vehicles, low public participation, and poor inter-agency coordination are major challenges to establishing an effective waste management system. The application of public management principles based on George R. Terry's approach is identified as a potential solution to improve management effectiveness, including the development of integrated planning, public education, and stronger collaboration among the government, market administrators, and local communities. This study emphasizes the need to strengthen institutional capacity, improve infrastructure, and implement continuous education programs as steps toward participatory and sustainable waste management.

Keywords: *Government Role, Waste Management, Public Management.*

PENDAHULUAN

Sampah didefinisikan sebagai barang yang telah ditinggalkan atau diproduksi oleh aktivitas alam atau manusia tetapi tidak lagi digunakan dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dapat berasal dari berbagai tempat, termasuk rumah, pasar, bisnis, dan aktivitas lainnya. Sampah juga dapat berupa benda padat, cair, atau gas. Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi lokal, pasar berfungsi sebagai tempat bertemu para pembeli dan penjual untuk berbisnis. Sebagai tempat yang ramai dikunjungi, pasar seharusnya mampu memberikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pengunjung. Namun, kenyamanan seringkali terganggu oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah manajemen pengelolaan sampah yang kurang baik. Masalah ini sering ditemukan di berbagai pasar tradisional di Indonesia, termasuk Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tumpukan sampah yang tidak terurus mengakibatkan berbagai masalah lingkungan yang signifikan. Selain mencemari estetika pasar, bau tidak sedap dari sampah yang membusuk menyebar ke seluruh area, mengurangi kenyamanan para pengunjung. Hal ini berdampak langsung pada citra pasar dan dapat mengurangi daya tarik bagi para pembeli. Tidak hanya itu, sampah yang menumpuk sering kali menyumbat saluran drainase di sekitar pasar, yang kemudian menyebabkan genangan air bahkan banjir lokal saat hujan deras. Situasi ini semakin memperburuk kondisi pasar, menjadikannya kurang ramah bagi pengguna.

Pasar Sentral Rappang merupakan salah satu pasar tradisional utama di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Berdasarkan observasi, permasalahan terkait lokasi pembuangan sampah di pasar ini menjadi isu yang belum terselesaikan. Terdapat banyak sekali sampah yang berserakan di pasar tersebut. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan gangguan terhadap estetika pasar, bau yang tidak sedap, serta menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar dan para pengunjung. Selain itu, kurangnya kesadaran sebagian pedagang dan pengunjung dalam menjaga kebersihan, minimnya fasilitas penampungan sampah yang memadai, serta keterlambatan dalam pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan memperburuk kondisi ini. Akibatnya, genangan air bercampur sampah sering muncul, terutama saat hujan, yang berpotensi menjadi sarang penyakit dan memperparah citra pasar serta menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di tempat tersebut.

Selain mengganggu estetika, pembuangan sampah yang tidak strategis juga mempengaruhi kualitas lingkungan pasar. Sampah yang menumpuk dapat menjadi sumber penyakit, mencemari udara, dan menciptakan kesan negatif terhadap pasar. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat sekitar, tetapi juga berpotensi menurunkan pendapatan pedagang karena berkurangnya pengunjung yang datang. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pengelolaan sampah yang kurang memadai.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Menyediakan sistem pengelolaan limbah yang menyeluruh, terorganisir dengan baik, dan berkelanjutan merupakan tujuan peraturan ini untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir diatur dalam undang-undang ini. Untuk mengelola sampah, seseorang harus mengikuti konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yang mendorong daur ulang sampah dengan nilai kegunaan, mengurangi penciptaan limbah, dan penggunaan kembali sumber daya yang masih dapat digunakan.

Masalah penelitian ini terletak pada ketimpangan yang nyata antara kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya di Pasar Sentral Rappang yang merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Meskipun Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, namun implementasinya di pasar tersebut belum berjalan optimal. Permasalahan seperti tidak tersedianya fasilitas pemilahan sampah, keterbatasan armada pengangkut, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya koordinasi antarinstansi menunjukkan bahwa instrumen kebijakan yang ada belum mampu menjawab tantangan operasional dan manajerial di lapangan.

Berdasarkan data yang didapatkan tidak ada tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah Kecamatan Panca Rijang, akan tetapi ada Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau biasa disebut dengan TPS3R, terletak di Jl. Poros Pinrang Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kurangnya informasi kepada masyarakat dengan adanya TPS3R di wilayah ini sehingga masyarakat membuang sampah dimana saja, yang semakin hari semakin bertambah terutama di Pasar Sentral Rappang.

Gagasan manajemen George R. Terry dapat digunakan untuk menggambarkan masalah pengelolaan sampah di Pasar Induk Rappang. Perencanaan merupakan konsep manajemen yang mendasar, yang dalam hal ini, pasar harus memiliki rencana yang matang mengenai lokasi dan sistem pengelolaan sampah. Namun, jika lokasi pembuangan sampah tidak terkelola dengan baik, itu mencerminkan kurangnya perencanaan yang memadai. Selanjutnya prinsip pengorganisasian, Pengorganisasian yang baik dalam pengelolaan sampah memerlukan penyusunan tim atau penanggung jawab yang jelas serta penyediaan fasilitas yang memadai, seperti tempat sampah yang tersebar di lokasi strategis. Tanpa pengorganisasian yang baik, sampah akan menumpuk di area yang tidak seharusnya, mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar.

Selanjutnya, prinsip penggerakan yang efektif harus melibatkan edukasi dan instruksi kepada pedagang, pengunjung, serta petugas kebersihan pasar mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan memisahkan sampah dengan benar. Prinsip pengendalian, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan sampah. Jika dibiarkan tak terkendali, sampah yang salah kelola akan terus merusak kenyamanan dan penampilan pasar, serta berdampak negatif pada kesehatan dan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan kata lain, ketidakterlaksanaan prinsip-prinsip manajemen yang tepat menyebabkan masalah sampah di Pasar Sentral Rappang terus berlanjut dan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. (Ripno et al., 2021)

Penelitian-penelitian terdahulu di wilayah yang sama (Dahri et al., 2022; Asyurah et al., 2023; Lukman et al., 2022) umumnya berfokus pada aspek evaluatif kebijakan pengelolaan sampah secara umum, dan belum menyangkut secara khusus konteks pasar tradisional sebagai titik kritis produksi sampah harian yang tinggi. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat kuantitatif dengan penekanan pada pengukuran tingkat efektivitas implementasi kebijakan, tanpa menggali lebih dalam dinamika peran pemerintah secara fungsional.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis peran pemerintah melalui empat fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry. Pendekatan kualitatif dengan analisis tematik berbantuan perangkat lunak NVivo digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hambatan dan potensi solusi dalam pengelolaan sampah berbasis manajemen publik yang partisipatif dan berkelanjutan di lingkungan pasar.

Permasalahan ini memunculkan kebutuhan akan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Rappang. Selain menjaga keindahan dan kebersihan pasar, pengelolaan sampah yang efektif juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Oleh karena itu, investigasi ini penting dilakukan untuk mengetahui sumber permasalahan dan memberikan saran yang dapat diterapkan oleh pihak terkait, baik pengelola pasar maupun pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar sentral Rappang yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Sulawesi Selatan. Pasar sentral Rappang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi daerah, sehingga dipilih lokasi ini, yang menghasilkan volume sampah yang signifikan setiap harinya. Pasar ini juga mencerminkan pengelolaan sampah daerah dengan aktivitas masyarakat, baik dari pihak pedagang, pengunjung pasar, maupun pengelola fasilitas pasar. Dengan demikian, lokasi ini relevan untuk mengamati peran pemerintah dalam pengelolaan sampah secara langsung. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Variabel pertama, “independen”, (Peran Pemerintah) (X), sedangkan variabel kedua, “dependent”,(Pengelolaan Sampah) (Y).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Rappang. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial serta dinamika kebijakan publik yang berkaitan dengan praktik pengelolaan sampah di tingkat lokal. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *snowball sampling*, yaitu metode pemilihan informan secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, terdapat enam informan utama yang dipilih, yaitu perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pasar, petugas kebersihan, pengelola TPS3R, pengunjung pasar, dan masyarakat setempat. Para informan ini dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan pengelolaan sampah serta pemahaman mereka terhadap kondisi di lapangan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi berupa catatan dan foto kondisi pasar. Peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan bantuan perangkat lunak NVivo, yang mendukung proses analisis data kualitatif secara sistematis. Proses analisis dimulai dengan tahap pengkodean (*coding*) untuk mengidentifikasi kutipan-kutipan penting dalam wawancara, kemudian dilanjutkan dengan analisis tematik (*thematic analysis*) guna mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, *fitur query tools* dan *visualisasi* dalam NVivo digunakan untuk menampilkan frekuensi kemunculan tema serta hubungan antar tema tersebut. Analisis ini menghasilkan pemetaan tematik yang menggambarkan secara rinci isu-isu utama seperti lemahnya perencanaan, keterbatasan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan sampah di pasar. Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang lebih tajam dan mendalam terkait efektivitas peran pemerintah dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip manajemen publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu tugas utama pemerintah daerah adalah mengelola sampah. Pemerintah bertugas menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini, yang mencakup mulai dari pemilahan dan pengangkutan sampah hingga pengolahan dan pembuangan akhir. Kebijakan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam menjaga kebersihan lingkungan, bahkan di tempat umum seperti pasar tradisional.

Namun, implementasi kebijakan tersebut di Pasar Sentral Rappang menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Peran pemerintah masih belum dilaksanakan secara efektif sebagaimana mestinya, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan dan kebersihan pasar. Beberapa faktor seperti keterbatasan armada pengangkut, tantangan terbesar dalam menerapkan program pengelolaan limbah menyeluruh di sektor ini adalah kekurangan personel dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Pemerintah daerah telah menginstruksikan agar pengelolaan sampah di Pasar Sentral Rappang dilakukan setiap hari. Namun, keterbatasan armada dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Hal ini diungkapkan oleh selaku Kepala Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup:

“Khusus untuk Pasar Rappang, pemerintah sebenarnya sudah memerintahkan agar pelayanan sampah dilakukan setiap hari, cuma terkendala armada. Dan juga kurangnya minat dari masyarakat yang ingin bekerja di tempat tersebut, sebenarnya kita mau tambah SDM tapi maklum mereka menganggap bahwa pekerjaan itu merupakan satu hal yang lumrah karena menyangkut dengan sampah.”

“Biasanya sampah-sampah yang tidak terangkut tepat waktu itu memang dikumpul dulu tetapi nanti kita selesaikan dengan cara diberikan jadwal khusus untuk pengangkutannya. Bayangkan saja kita sudah setiap hari mengangkut sampah disana, tetapi masih kewalahan juga. Terutama masyarakat disana yang kurang kesadarannya mereka umumnya membuang sampahnya itu pada malam hari, jadi otomasi orang yang dipasar pada saat itu sudah tidak ada yang mengawasi.” (Wawancara 29 April 2025)

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pasar juga menegaskan bahwa kapasitas pengangkutan masih belum mencukupi:

“Harapan kita ke depan semoga lebih diperhatikan oleh pemerintah karena kita hanya memiliki satu mobil kontainer, itu jelas tidak cukup untuk menampung volume sampah yang terus bertambah.” (Wawancara 8 April 2025)

Dari sisi pengunjung pasar, tidak terlihat adanya fasilitas pemilahan yang jelas, Pengunjung Pasar:

“Sejauh yang saya lihat, belum ada tempat sampah yang dipisah antara organik dan anorganik. Bahkan, tempat sampah pun kadang tidak tersedia di area ramai, jadi orang cenderung membuang sampah sembarangan. Dan pusatnya itu yang paling banyak yah dibelakang pasar.” (Wawancara 8 April 2025)

Koordinasi antarinstansi dinilai belum berjalan optimal. Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa peran pengelola pasar dalam membantu pengelolaan masih sangat minim, Kepala Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup:

“Kalau untuk pasar Rappang memang juga tergantung pada kesadaran masyarakat. Kan kita tahu bahwa pasar Rappang itu volume sampahnya sudah terlalu banyak, sehingga SDM yang hanya satu orang pastinya kewalahan dalam hal melakukan pengumpulan karean yang atur sampah itu hanya satu orang saja. Tapi dalam pemilahannya itu yang harus turun tangan langsung adalah pengelola pasarnya sendiri (Kepala Pasar). Tetapi selama ini yang dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang selalu melakukan itu, orang yang dipekerjakan itu adalah orangnya kita (DLH) sementara dari pasarnya sendiri yang harusnya ikut membantu boleh dikatakan minim perhatian.” (Wawancara 29 April 2025)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Pengelola TPS3R:

“Kalau masalah kerjasama dengan pasar itu tidak ada karena kita inikan sama-sama dibawah naungan pemerintah, TPS3R berdiri sendiri yang kelola sampah pasar juga berdiri sendiri. Disini kan memang untuk pemilahan sampah kalau dipasarkan memang ada petugasnya yang angkut.” (Wawancara 29 April 2025)

Dalam hal pelibatan masyarakat dan penggerakan kebersihan, belum tampak adanya langkah signifikan. Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa edukasi dan pengarahan seharusnya dilakukan oleh kepala pasar. Warga sekitar juga mengungkapkan belum pernah diajak dalam kegiatan gotong royong.

Selaku warga setempat mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, saya belum pernah melihat adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam bentuk kerja bakti atau gotong-royong yang difasilitasi pemerintah. Semua seakan dibiarkan begitu saja, dan warga sekitar sini hanya bisa mengeluh tanpa ada tindak lanjut yang jelas.”

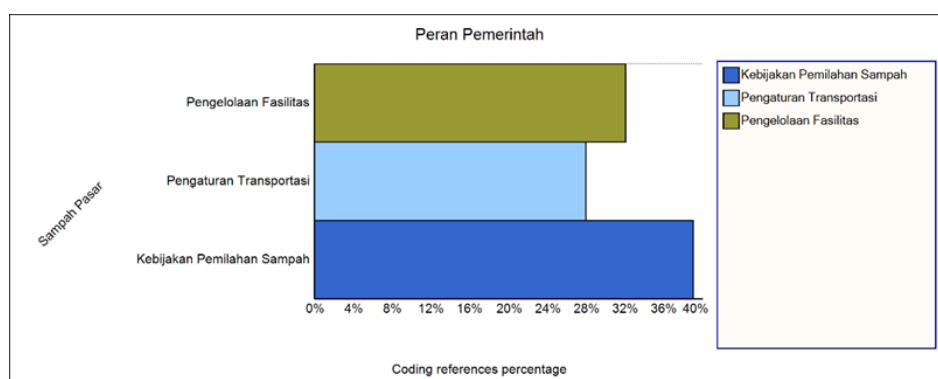
“Pengangkutan sampah selalu dilakukan, tetapi setiap hari juga sampah tetap menumpuk. Akibatnya, bau menyengat menyebar sampai ke rumah-rumah warga, dan lingkungan jadi kotor serta menimbulkan banyak lalat dan tikus. Sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan.”

“tentu sangat banyak keluhan, terutama tentang bau yang menyengat dan mencemari udara. Selain itu, air got juga sering berubah warna dan berbau, diduga akibat dari limbah pasar yang tidak dikelola dengan baik. Biasa kita mau makan juga tercium bau yang sangat tidak enak. Ini jelas mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga sekitar pasar ini.” (Wawancara 14 April 2025)

Monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah masih belum efektif. Petugas kebersihan mengalami kendala dalam mengontrol kebersihan pasar secara menyeluruh.

Petugas kebersihan pasar mengatakan:

“Masalah sampah yang ada dibelakang pasar yang menjadi kendala dalam pengelolaannya yaitu butuh tenaga kerja, karena kalau masalah pengangkutan itu 2kali dalam sehari. Biasa kalau sore tempatnya sudah bersih, malamnya datang lagi sampah. Dan orang kalau dikasi teguran itu selalu bilang “adai pekerjanya” memang betul ada tapi kita juga butuh itu bagaimana masyarakat bisa sadar dan bekerjasama dalam hal ini membuang sampah. Karena lebih banyak sampah yang dihasilkan dari rumah tangga daripada pasar itu sendiri.” (Wawancara 8 April 2025)



Gambar 1. Tema Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah
Sumber: Hasil analisis data NVivo, 2025

Dari hasil wawancara yang telah dikode dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo, diketahui bahwa topik kebijakan pemilahan sampah menjadi aspek yang paling banyak disebutkan oleh para informan yaitu sebanyak 40%, baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pasar, maupun masyarakat. Hal

ini mencerminkan bahwa masih terdapat perhatian besar terhadap belum optimalnya implementasi kebijakan terkait pemilahan sampah di Pasar Sentral Rappang. Sebagaimana dijelaskan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, pemilahan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola pasar, namun realitasnya pelaksanaannya masih banyak dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup, sementara koordinasi lintas lembaga belum berjalan maksimal. Selain itu, pengunjung pasar juga mengeluhkan ketiadaan tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik, serta minimnya edukasi yang mendorong perilaku memilah sampah sejak dari sumbernya.

Selanjutnya, pengaturan transportasi sebanyak 28%, yang menunjukkan bahwa sistem pengangkutan sampah dari pasar ke tempat pembuangan akhir (TPA) masih menjadi tantangan besar. Petugas kebersihan menyampaikan bahwa meskipun pengangkutan dilakukan dua kali sehari, volume sampah yang tinggi dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di malam hari menyebabkan terjadinya penumpukan yang berulang. Di sisi lain, armada pengangkut yang terbatas dan hanya satu unit kontainer membuat proses pengangkutan tidak bisa menjangkau seluruh area pasar secara efektif.

Adapun pengelolaan fasilitas sebanyak 32%, hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat sekitar pasar. Bahkan, menurut informasi dari pengelola TPS3R, tidak ada alur langsung antara sampah pasar dengan TPS3R, karena unit ini lebih difokuskan pada pemrosesan sampah rumah tangga dari wilayah khusus. Masyarakat setempat juga mengeluhkan tidak adanya TPS yang memadai di sekitar pasar, sehingga sebagian warga membuang sampah sembarangan, yang kemudian menimbulkan pencemaran udara dan lingkungan.

Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan sampah masih didominasi oleh persoalan kebijakan dan teknis operasional dasar, dan belum menyentuh optimalisasi fasilitas maupun pelibatan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini menjadi catatan penting bahwa penguatan peran pemerintah ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada kebijakan dan pengangkutan, tetapi juga pada penyediaan infrastruktur yang layak dan sistem pengelolaan yang kolaboratif.

Langkah-Langkah Meningkatkan Pengelolaan Pasar

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, diperlukan langkah-langkah strategis yang mengacu pada prinsip manajemen publik: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pengelolaan sampah di Pasar Sentral Rappang, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan tersebut.

Pendapat dan informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi landasan penting dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat dan aplikatif guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kepala pasar berharap ada rencana jangka panjang yang konkret dari pemerintah daerah untuk menambah sarana dan fasilitas:

“Harapan kita kedepannya semoga lebih diperhatikan oleh pemerintah karena disini juga kita hanya memiliki satu mobil container jadi pastinya tidak bisa menampung volume sampah yang terus bertambah setiap harinya.” (Wawancara 8 April 2025)

Pengunjung pasar pun menyarankan perlunya edukasi:

“Saya berharap pemerintah dan pengelola pasar menyediakan lebih banyak tempat sampah yang dipisahkan jenisnya, serta meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah. Mereka juga harus memberikan edukasi kepada pedagang dan pengunjung tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.” (Wawancara 8 April 2025)

Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup mengatakan:

“Ada sebenarnya, kita maunya orang yang terlibat disitu baik itu pedagang, kepala pasar, dan juga masyarakat bekerja sama untuk memberantas sampah. Tetapi kewenangan bukan itu bukan dari Dinas Lingkungan Hidup yang harus memberikan pengarahan tersebut, harusnya sebagai kepala pasar yang harus menjaga lingkungan pasarnya.” (Wawancara 29 April 2025)

Pengelolaan masih minim dari sisi personel. Di TPS3R, hanya tersedia enam petugas, pengelola TPS 3R:

“Kalau di TPS 3R ini pekerjanya itu 4 orang di pemilahan dan 2 orang untuk pengangkutan sampahnya. Setelah pemilahan sampah disini diangkut kembali ke TPA di Patommbo, biasanya pengangkutannya setiap hari minggu.” (Wawancara 29 April 2025)

Warga juga mengusulkan perlunya tim kerja yang melibatkan masyarakat:

“Jujur saja, saya menilai respon pemerintah lambat dan tidak serius. Sudah sering warga menyampaikan keluhan secara langsung, tapi tidak ada perubahan yang berarti. Sampah tetap menumpuk, bau tetap menyengat, dan tidak ada solusi jangka panjang yang terlihat. Tidak ada tim kerja yang melibatkan warga, padahal kami yang paling terdampak bau dan pencemaran.”

“Saya sangat setuju jika ada tambahan TPS yang dikelola dengan baik. Asalkan diletakkan di lokasi yang strategis, jauh dari permukiman, dan dijaga kebersihannya serta diangkut secara rutin, TPS bisa menjadi solusi untuk mengurangi tumpukan sampah yang kini berserakan di belakang pasar.” (Wawancara 14 April 2025)

Dari Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Kita sudah sampaikan sebenarnya kepada Kepala Pasar untuk memperhatikan sampah yang ada di pasar Rappang itu, tetapi seperti yang saya katakan tadi kondisinya tidak memungkinkan artinya orang kita yang ada disana (DLH) sudah kewalahan sementara bantuan dari pasar sendiri boleh dikatakan minim sehingga kita juga berpikir “ini kok tidak ada kerjasamanya yah dari pihak pasarnya” cuman ujung-ujungnya pasti kembali ke kita. Yang jelasnya semua persoalan sampah meskipun kita sudah mengerjakan dengan baik tetap larinya ke Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan sampah yang berceceran atau tidak terangkut.” (Wawancara 29 April 2025)

Petugas kebersihan mengusulkan adanya upaya kolaboratif antara petugas dan warga:

“Kami tidak bisa kerja sendiri. Harus ada kesadaran dari masyarakat, jangan semua dibebankan ke petugas.” (Wawancara 8 April 2025)

Pengunjung pasar juga mengatakan:

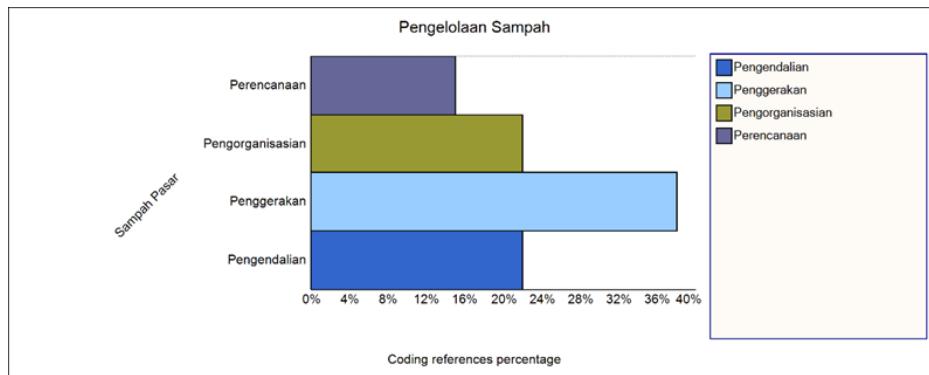
“Saat ini sistemnya masih sangat tidak terkontrol. Sampah sering dibiarkan menumpuk, dan sepertinya tidak ada petugas khusus yang mengawasi atau menindaklanjuti kebersihan pasar secara rutin. Kalaupun ada, bagusnya lebih ditingkatkan cara kerjanya karena volume sampah kan akan bertambah setiap harinya.” (Wawancara 8 April 2025)

Pengendalian dan evaluasi belum terstruktur. Kepala pasar menyatakan belum ada sistem monitoring internal:

“Bantuannya itu dari Lingkungan Hidup yang selalu datang mengangkut sampah yang ada di pasar ini kalau disini kita sudah kewalahan kemudian dibawa ke TPA yang di Patommbo itu.” (Wawancara 8 April 2025)

Pengunjung pasar menilai sistem pengelolaan masih belum terkontrol:

“Sampah sering dibiarkan menumpuk. . Terutama di bagian belakang pasar, sampah bisa menumpuk berhari-hari. Bau busuknya sangat mengganggu dan membuat kita tidak nyaman untuk berbelanja, bahkan ada itu genangan air kotor di sekitarnya .” (Wawancara 8 April 2025)



Gambar 2. Tema Langkah-Langkah Pengelolaan Sampah
Sumber: Hasil analisis data NVivo, 2025

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo, ditemukan bahwa aspek penggerakan (actuating) menempati persentase tertinggi yaitu 40% dalam pengkodean referensi dari seluruh transkrip wawancara. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelibatan dan mobilisasi aktor-aktor terkait, seperti petugas kebersihan, pedagang, pengelola pasar, serta masyarakat umum, menjadi isu yang paling banyak disorot oleh informan. Sebagian besar narasumber menyampaikan pentingnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Kebersihan di Pasar Sentral Rappang, *“banyak warga yang kurang peduli terhadap tata cara membuang sampah, dan sering kali justru menganggap bahwa kebersihan adalah semata-mata tugas petugas lapangan.”*

Sementara itu, aspek pengorganisasian muncul sebagai tema kedua sebanyak 22% yang dikode oleh NVivo. Permasalahan utama yang sering dibahas berkaitan dengan minimnya koordinasi antara instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pasar, dan TPS3R, serta kurangnya personel atau tim kerja yang ditugaskan secara khusus.

Selanjutnya, pengendalian muncul pada posisi ketiga sebanyak 22% yang menggambarkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah. Kepala Pasar Sentral Rappang menyebutkan bahwa saat ini tidak ada sistem evaluasi internal yang dilakukan secara rutin. Sementara tanggung jawab pengawasan lebih banyak dilakukan oleh DLH, yang sudah kewalahan dengan beban operasional.

Di sisi lain, perencanaan merupakan aspek yang paling sedikit yaitu 16% disebut dalam hasil wawancara, baik oleh petugas teknis maupun oleh masyarakat. Rendahnya perhatian terhadap perencanaan menunjukkan bahwa strategi jangka panjang untuk pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama. Padahal, tanpa perencanaan yang baik, upaya pengorganisasian dan pelaksanaan di lapangan akan selalu bersifat reaktif. Kepala pasar mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah dapat merancang kebijakan jangka panjang untuk menambah fasilitas dan armada pengangkut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggerakan atau mobilisasi peran individu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sampah pasar, sementara perencanaan sebagai fondasi utama manajemen justru masih sangat kurang disorot, sehingga menyebabkan sistem berjalan tanpa arah yang jelas dan tanpa target capaian yang terukur. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem manajemen pengelolaan sampah yang seimbang antara strategi perencanaan, pembagian tugas organisasi, pelaksanaan lapangan, dan pengawasan berkala.

Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo, diperoleh beberapa hasil utama yang dikategorikan berdasarkan fungsi manajemen publik menurut George R. Terry.

1. Perencanaan (Planning)

Tidak terdapat perencanaan zonasi sampah atau sistem pemilahan yang terstruktur. Pemerintah daerah hanya memberikan instruksi operasional tanpa ada peta jalan pengelolaan yang strategis. Informan dari Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa instruksi pengangkutan harian tidak diiringi perencanaan logistik yang matang.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah masih terpusat pada Dinas Lingkungan Hidup. Peran pengelola pasar sangat minim. Koordinasi lintas instansi seperti dengan TPS3R juga tidak terjadi. Hal ini menghambat efektivitas pengelolaan operasional harian.

3. Penggerakan (Actuating)

Belum ada edukasi atau pelatihan kepada pedagang maupun masyarakat mengenai pemilahan atau pembuangan sampah yang benar. Tidak ada inisiatif gotong royong atau kampanye publik terkait kebersihan pasar.

4. Pengendalian (Controlling)

Pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah belum dilakukan secara sistematis. Petugas kebersihan melaporkan adanya penumpukan berulang karena kurangnya pengawasan terhadap perilaku pembuangan sampah masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan sampah di Pasar Sentral Rappang masih sangat terbatas. Pemerintah daerah hanya memberikan arahan operasional, tanpa menyusun peta jalan atau strategi pengelolaan jangka panjang berbasis zonasi dan kebutuhan lokal. Hal ini bertentangan dengan prinsip manajemen publik George R. Terry yang menekankan pentingnya perencanaan strategis sebagai fondasi pelaksanaan kegiatan publik. Minimnya rencana pemilahan dan distribusi sarana menunjukkan lemahnya peran perencanaan yang seharusnya menjadi acuan dalam tindakan teknis lapangan.

Dari sisi pengorganisasian, struktur tanggung jawab dalam pengelolaan sampah masih tersentralisasi pada Dinas Lingkungan Hidup. Tidak ada pembagian peran yang jelas antara instansi terkait, termasuk pengelola pasar dan TPS3R. Akibatnya, terjadi tumpang tindih peran dan ketergantungan berlebih terhadap DLH. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Lukman et al. (2022) yang menyoroti lemahnya kelembagaan dalam sistem pengelolaan sampah daerah.

Sementara pada aspek penggerakan, belum terlihat adanya upaya edukasi atau pelibatan aktif masyarakat dan pedagang pasar. Pemerintah dan pengelola pasar belum menjalankan strategi komunikasi publik yang efektif untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya kebersihan dan pemilahan sampah. Ini memperkuat temuan Irman (2004), bahwa kegagalan membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan lingkungan berbasis komunitas.

Pada aspek pengendalian dalam sistem pengelolaan sampah juga menunjukkan kelemahan. Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi rutin yang diterapkan, serta tidak tersedia sanksi bagi pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan. Akibatnya, masyarakat merasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan pasar. Kondisi ini konsisten dengan studi Asyurah et al. (2023) yang menegaskan pentingnya kontrol sosial dan pengawasan berbasis komunitas dalam menjaga keberlanjutan kebijakan pengelolaan lingkungan. Kurangnya evaluasi dan sanksi membuat masyarakat tidak terdorong untuk mengikuti aturan. Ini senada dengan temuan Asyurah et al. (2023) yang menyatakan pentingnya kontrol sosial dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini memperkuat relevansi prinsip manajemen publik George R. Terry dalam konteks layanan dasar seperti pengelolaan sampah. Namun dalam praktiknya, prinsip ini tidak cukup tanpa dukungan kelembagaan dan sosial. Memperluas temuan Dahri et al. (2022) tentang lemahnya implementasi kebijakan sampah di tingkat lokal, serta menambahkan dimensi kegagalan kolaboratif lintas lembaga yang belum banyak dikaji di konteks pasar tradisional.

Implikasi Teoretis dan Praktis

1. Teoretis: Diperlukan modifikasi dari pendekatan George R. Terry agar lebih fleksibel terhadap konteks lokal, khususnya dalam penguatan fungsi pengorganisasian dan penggerakan sosial.
2. Praktis: Pemerintah daerah perlu mengembangkan model kolaborasi antara DLH, pengelola pasar, dan masyarakat. Penyusunan perencanaan zonasi, penambahan TPS terkelola, dan kampanye edukatif dapat menjadi langkah awal.
3. Kebijakan: Perda No. 7 Tahun 2016 perlu direvisi agar mencantumkan pedoman implementasi yang rinci dan mengikat semua pihak yang terlibat, serta menyediakan insentif dan sanksi yang jelas.
4. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya menjawab permasalahan lokal tetapi juga memberi kontribusi pada perbaikan teori manajemen publik dan praktik pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari keterkaitan antara teori dan data lapangan adalah pengelolaan sampah Pasar Sentral Rappang belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang terorganisasi dan berimbang. Agar pengelolaan sampah dapat lebih bertumpu pada kolaborasi multipihak dan strategi berkelanjutan, bukan hanya langkah-langkah teknis, diperlukan perbaikan di bidang perencanaan strategis, kemampuan organisasi, dan sistem evaluasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Rappang belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya implementasi prinsip manajemen publik seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya armada dan petugas, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar.

2. Langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah meliputi penyusunan rencana pengelolaan yang terintegrasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan fasilitas dan sumber daya, serta pelibatan aktif masyarakat. Pendekatan manajemen publik ala George R. Terry dapat menjadi solusi melalui penguatan struktur kelembagaan, edukasi berkelanjutan, serta diperlukan rencana pengelolaan limbah yang lebih menyeluruh yang melibatkan pemerintah, pengelola pasar, petugas kebersihan, dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antin, T., Wahyuni, H. I., & Partini, P. (2018). Dinamika Peran Jejaring Pengelolaan Sampah Dalam Komunikasi Literasi Sampah. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 116. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i2.1479>
- Arifin, H. (2018). Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. *Jurnal Menara Ilmu*, XII(8), 61–68.
- Dahri, H., Erfina, E., & Ibrahim, M. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 10(3), 109–113. <https://doi.org/10.55678/jia.v10i3.779>
- Elisa, E., & Panggabean, N. S. (2019). Pengembangan LKS Berbasis CELS (Combining Experiments By Laboratory Simulation) Sebagai Solusi Miskonsepsi Pada Gerak Dan Gaya Hukum Newton. *Jurnal Ikatan Alumni Fisika*, 5(4), 58. <https://doi.org/10.24114/jiaf.v5i4.15342>
- Hamdan, Rifani, D. N., Jalaluddin, A. M., & Rudiansyah. (2018). Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat. *Paradigma*, 7(1), 45–54.
- Kaefer, F., Roper, J., & Sinha, P. (2015). *A Software-Assisted Qualitative Content Analysis of News Articles : Example and Reflections*. 16(2).
- Kholili, A. N. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Mobile. *Intech*, 4(1), 28–34. <https://doi.org/10.54895/intech.v4i1.1982>
- Kusnadi, Y., & Mutoharoh. (2016). Pengaruh Keterimaan Aplikasi Pendaftaran Online terhadap Jumlah Pendaftaran di Sekolah Dasar Negeri Jakarta. *Paradigma*, XVIII(2), 89–101.
- Lukman, L., Ibrahim, A., Nur Indar, N. I., & Abdullah, M. T. (2022). Evaluasi Konteks Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 177–181. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.756>
- Marjan, A., Taufik, I., Nugraha, W. I., Pirngadi, B. H., & Fatah, F. (2024). *Peningkatan Peran Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Banten*. 8(1), 991–1004.
- Muh. Aswan Asyurah, Sapri, M. I. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng. *Pengelolaan Sampah*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ObKpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA331&dq=teori+dan+isu+pembangunan&ots=m0ikJzyNIQ&sig=tAb3v6F3yaca61JgsiMmS67xD4U>
- Pita Puspita Saraswati, Suyeno, L. R. P. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Is. *Jurnal Respon Publik*, 17(12), 55–65.
- Ramdhiani, T. N. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4, No.(1), 282–293. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/06/E-JOURNAL Tri Nanda \(06-14-13-01-34-12\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/06/E-JOURNAL Tri Nanda (06-14-13-01-34-12).pdf)
- Ripno, R., Nathalia, T. C., & Pramono, R. (2021). Waste Management in Supporting Sustainable Tourism Case Study of Touris Destination Malioboro Yogyakarta. *International Journal of Social, Policy and Law*, 2(2), 1–4. <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/37>
- Sapanli, K., Putro, F. A. D., Arifin, S. D., Putra, A. H., Andamari, H. A., & Anggraini, U. (2023). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Circular Economy di Tingkat Desa: Pendekatan Sistem Dinamik. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 11(2), 141–155. <https://doi.org/10.14710/jwl.11.2.141-155>
- Sapri, S., Lukman, L., Darwis, C., & Sanusi, H. (2021). Kinerja Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i1.1100>
- Sofyan, A. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jayapura. *Papua Review Jurnal*.
- Sudrajat, A. S. E., Santoso, R. B., & Sundaro, H. (2023). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tps 3R Di Kecamatan Klambu. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.29603>
- Slamet, J. S. (1994). *Higiene Lingkungan*. Jakarta: Penerbit FKUI. Halaman 52.